

PERAN PENDAMPING PKH DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN DI DESA SARAE RUMA KECAMATAN LANGGUDU KABUPATEN BIMA

Nurhasanah¹, Arifuddin², Syaifullah³

Program Studi Pendidikan Sosiologi STKIP, Bima^{1,2,3}

e-mail: Nurhasanahanna154@gmail.com¹, arifuddinwise@gmail.com²,
syaifullahsosiologi@gmail.com³

Abstrak

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bima, angka kemiskinan tahun 2021 mencapai 16.220 jiwa, jika dibandingkan tahun 2020, yang mencapai sekitar 14.660 jiwa. Peter, (2022) bahwa persentase penduduk Kota Bima yang dikategorikan miskin meningkat pada tahun 2020, mencapai 8,35%, sedangkan pada tahun 2021 terus bertambah menjadi 8,88 persen. Hal ini menandakan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Bima masih cukup rendah. Untuk meminimalisir kemiskinan, maka pemerintah memberikan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), keluarga miskin didorong untuk memiliki akses, memanfaatkan pelayanan sosial, kesehatan, pendidikan, pangan, gizi, perawatan, pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya. Permasalahan dalam penelitian ini dilihat dari angka kemiskinan yang masih cukup tinggi di Kota dan Kabupaten Bima, bahwa PKH belum mampu memberdayakan masyarakat miskin. Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan peran PKH dalam memberdayakan masyarakat miskin di Desa Sarae Ruma Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima. Penelitian merupakan penelitian field research dengan metode penelitian deskriptif kualitatif, Informan penelitian adalah Pendamping PKH di Desa sarae Ruma Kecamatan langgudu kabupaten Bima, teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian data penelitian di analisis dengan display data, verifikasi data dan uji keabsahan data, lalu kesimpulan. Hasil penelitian ini bahwa peran pendamping PKH terhadap pemberdayaan masyarakat miskin secara berangsur-angsur semakin kelihatan dalam aspek pendidikan, kesehatan dan ekonomi, namun terdapat 10 masyarakat yang sudah 3 tahun menerima PKH, namun acuh tak acuh bekerja, menyekolahkan anak, sering menyalahgunakan kartu PKH dan sengaja tidak merenovasi rumah dengan alasan bahwa menjadi miskin akan ditanggung kehidupannya, rata-rata tidak mengetahui bahwa menjadi peserta PKH memiliki jangka waktu, ketergantungan masyarakat terhadap pemerintah semakin tinggi.

Kata Kunci : *peran, pendamping PKH, pemberdayaan, masyarakat miskin*

Abstract

Based on data from the Central Statistics Agency (BPS) of Bima City, the poverty rate in 2021 will reach 16,220 people, compared to 2020, which reached around 14,660 people. Peter, (2022) that the percentage of the population of Bima City who are categorized as poor will increase in 2020, reaching 8.35%, while in 2021 it will continue to increase to 8.88 percent. This indicates that the level of welfare of the people of Bima is still quite low. To minimize poverty, the government provides assistance to the Family Hope Program (PKH), poor families are encouraged to have access to, utilize social services, health, education, food, nutrition, care, assistance, including access to various other social protection programs. The problem in this research is seen from the poverty rate which is still quite high in Bima City and Regency, that PKH has not been able to empower the poor. The purpose of the study was to describe the role of PKH in empowering the poor in Sarae Ruma Village, Langgudu District, Bima Regency. This research is a field research research with qualitative descriptive research methods, research informants are PKH assistants in sarae Ruma village, langgudu district, Bima district, data collection techniques are

observation, interviews, and documentation. Then the research data is analyzed by displaying data, data verification and data validity testing, then conclusions. The results of this study show that the role of PKH facilitators in empowering the poor is gradually becoming more visible in the aspects of education, health and economy, but there are 10 people who have received PKH for 3 years, but are indifferent to work, send their children to school, often misuse the PKH card and deliberately not renovating houses on the grounds that being poor will be borne by life, on average they do not know that being a PKH participant has a period of time, the community's dependence on the government is getting higher.

Keywords: *role, PKH companion, empowerment, the poor*

PENDAHULUAN

Sejak tahun 2007 lalu Pemerintah Indonesia menerbitkan Program Keluarga Harapan. Program PKH yang diistilahkan dengan bantuan tunai bersyarat. PKH adalah program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dan bagi anggota keluarga rumah tangga miskin diwajibkan melaksanakan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Program ini, dalam jangka pendek bertujuan mengurangi beban RTSM dan dalam jangka panjang diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan antar generasi, sehingga generasi berikutnya dapat keluar dari jurang kemiskinan. Pelaksanaan PKH juga mendukung upaya pencapaian tujuan pembangunan Millenium Development Goals (MDG,s). Lima komponen tujuan MDG,s yang terbantu oleh PKH yaitu: Pengurangan penduduk miskin dan kelaparan, Pendidikan dasar, Kesetaraan Jender, Pengurangan angka kematian bayi dan Pengurangan kematian ibu melahirkan.

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Dalam pelaksanaan Program Kementerian Sosial tersebut, di Nusa Tenggara Barat telah mencapai data yang signifikan. Data Graduasi sejahtera mandiri sebanyak 1.802 KPM. Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB, Dra. T. Wismaningsih. Drajadiah mengungkapkan, Berdasarkan datayang disampaikan pelaksanaan PKH di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota di NTB.

Dalam mememproses perubahan perilaku tersebut, sederet nama-nama KPM dengan cerita sukses bangkit dari kemiskinan mencuat. Seperti ibu Hadijah, peserta PKH di Desa Sarae Ruma kecamatan Langgudu Kabupaten Bima. Ibu Hadijah sukses dengan usaha Warung makannya. Bahkan secara sukarela mengundurkan diri dari kepesertaan PKH. Pada tahun 2020, angka graduasi sejahtera mandiri akan terus ditingkatkan oleh SDM PKH.

Program Keluarga Harapan(PKH) pengaturannya dapat kita lihat dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (Permensos 1/2018). Syarat dan Kriteria kepesertaan PKH, antaranya komponen kesehatan meliputi ibu hamil/menyusui, dan anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun Kriteria komponen pendidikan meliputi : anak sekolah dasar/madrasah ibtdaiyah atau sederajat, anak sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah sederajat anak sekolah menengah atas/madrasah aliyah atau sederajat dan anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun. Dan Kamena komponen kesejahteraan sosial meliputi lanjut usia mulai dari 60 tahun, dan penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat. Di Kabupaten Bima sendiri jumlah penerima tahun 2019 sebanyak 34 975 Keluarga Penerima Manfaat Se- Kabupaten Bima akan menikmati dan Program Keluarga Harapan yang diluncurkan oleh Kementrian Sosial RI, dan 2.716 di antaranya di Kecamatan Langgudu Banyaknya penerima bantuan Program Keluarga Harapan terschin bukan berarti tidak memiliki hambatan dan kendala di lapangan, dari awal penyaluran sampai di

tahun 2020 ini masih saja ditemukan potanik seпени penyaluran tidak tepat sasaran, terdapat data ganda, masyarakat belum paham kriteria penerima PKH, tidak adanya aktifitas kelompok penerima manfaat, tidak adanya data pembandingan dari pemerintah desa untuk menanggulangi ketidaktepaan sasaran penerima manfaat dan tidak ada langkah kongkrit pemerintah untuk segera mengavaluasi tingkat kesejahteraan masyarakat penerima maanfaat.

Berdasarkan observasi awal peneliti pada tanggal 2 Februari Di Desa Sarae Ruma Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima sendiri masyarakat dihadapkan pada persoalan kurang memahami terkait mekanisme pendataan seleksi dan penetapan atau syarat-syarat untuk mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan adalah hasil nepotisme atau orang terdekatnya pemerintah desa. Contoh kasus berikutnya seorang ketua rukun tentangga mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan namun ingin keluar dari bantuan tersebut di alihkan ke masyarakat yang berhak menerima karena merasa sudah mampu tetapi belum di verifikasi dan validasi ulang oleh pihak terkait.

Evaluasi begitu penting untuk pengukuran dan perbaikan dalam kegiatan yang dilaksanakan, seperti membandingkan hasil-hasil kegiatan yang dibuat. Tujuannya agar rencana-rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dapat terselenggarakan. Hasil evaluasi dimaksudkan untuk perencanaan kembali, dan juga berfungsi sebagai administrasi dan manajemen yang terakhir. Yaitu mengkombinasikan dan mengumpulkan data dengan standar tujuan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Peran Pendamping PKH dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Desa Sarae Ruma Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima".

KAJIAN PUSTAKA

1. Peran Pendamping Keluarga PKH

a. Pendamping PKH

Pendamping menurut Direktorat Bantuan Sosial, (2007:4) pendampingan adalah suatu proses pemberian

kemudahan (fasilitas) yang diberikan pendamping kepada klien dalam mengidentifikasi kebutuhan dan memecahkan masalah serta mendorong tumbuhnya inisiatif dalam proses pengambilan keputusan, sehingga kemandirian klien secara berkelanjutan dapat diwujudkan Menurut Departemen Sosial RI, (2009: 122) pendampingan social merupakan suatu proses relasi sosial antara pendamping dengan klien yang bertujuan untuk memecahkan masalah, memperkuat dukungan, mendayagunakan berbagai sumber dan potensi dalam pemenuhan kebutuhan hidup, serta meningkatkan akses klien terhadap pelayanan sosial dasar. lapangan kerja, dan fasilitas pelayanan publik lainnya. Sedangkan Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pemberdayaan keluarga miskin berupa bantuan tunai bersarat yaitu Peserta PKH diwajibkan memenuhi persyaratan dan komit menyang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia bidang pendidikan dan kesehatan Program tersebut merupakan kerja sama lintas kementerian dan lembaga, karena aktor utamanya adalah dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bapenas), Departemen Nasional, Sosial, Departemen Kesehatan, Departemen Pendidikan Departemen Agama, Departemen Komunikasi dan Informatika, dan Badan Pusat Statistik Komponenyang menjadi focus utama program ini adalah bidang kesehatan dan pendidikan. Tujuan utama PKH bidang Pendidikan yaitu peningkatkan angka partisipasi sekolah, sedangkan tujuan utama PKH kesehatan adalah meningkatkan status kesehatan ibudan anak di Indonesia, khususnya bagi kelompok masyarakat sangat miskin, melalui pemberian insentif untuk melakukan kunjungan kesehatan yang bersifat preventif (pencegahan, dan bukan pengobatan).

Sasaran Program Keluarga Harapan (PKH) adalah Keluarga Sangat Miskin KSM) berdasarkan Basis Data Terpadu yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Peserta PKH harus

erdaftar dan hadir pada fasilitas kesehatan dan pendidikan terdekat. Kewajiban peserta PKH dibidang kesehatan meliputi pemeriksaan kandungan ibu hamil, pemberian asupan gizi dan imunisasi serta timbang badan anak balita. Sedangkan kewajiban di bidang pendidikan adalah mendaftarkan dan memastikan kehadiran anggota keluarga PKH kesatuan pendidikan sesuai jenjang sekolah dasar dan menengah. Khusus anggota keluarga PKH penyandang disabilitas, kewajibannya disesuaikan dengan kondisi disabilitasnya. Dalam jangka pendek dana bantuan ini diharapkan mampu mengurangi beban pengeluaran rumah tangga (dampak konsumsi langsung), dan dalam jangka merupakan investasi generasi masa depan yang lebih baik melalui peningkatan kesehatan dan pendidikan (dampak pengembangan modal manusia) artinya, PKH diharapkan sebagai program yang mampu memutus rantai kemiskinan antar generasi. Tujuan utama program PKH yaitu meningkatkan partisipasi anak sekolah serta meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil (bumil) ibu nifas, bawah lima tahun (balita) dan anak prasekolah (Apras) anggota Keluarga Sangat Miskin (KSM). Namun bantuan tersebut hanya sebagai stimulan Bantuan Sosial (Bansos) yang diberikan kepada Keluarga Sangat Miskin.

b. Mekanisme Program Keluarga Harapan

Dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan sekaligus pengembangan kebijakan dibidang perlindungan sosial, Pemerintah Indonesia menyelenggarakan Program Keluarga Harapan (PKH). PKH lebih dimaksudkan kepada upaya membangun system perlindungan masyarakat miskin. 2 Dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) secara teknik dijalankan berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 42/ HUK/ 2007 tentang Program Keluarga Harapan bagi Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). PKH adalah program perlindungan social yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). PKH merupakan program penentasan

kemiskinan yang bersifat memberikan bantuan pada RTSM dalam bidang pendidikan dan kesehatan sebagai bentuk perlindungan social oleh pemerintah kepada masyarakat." Saat ini jumlah penerima manfaat sampai dengan tahun 2016 mencapai enam juta, jumlah sangat banyak walaupun penerima PKH masih sebagian kecil dari jumlah keseluruhan penduduk miskin di Indonesia. 3 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH) Sejak tahun 2007. Tujuan utama PKH adalah untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia (SDM) terutama bidang pendidikan dan kesehatan pada kelompok Rumah Tangga Sangat Miskin/ Keluarga Sangat Miskin (RTSM/KSM). 4 Kewajiban penerima PKH berkaitan dengan kesehatan dan pendidikan. RTSM yang sudah ditetapkan menjadi peserta PKH dan memiliki kartu PKH diwajibkan memenuhi persyaratan kesehatan seperti mengontrol kandungan ibu hamil, menimbang dan member I vitamin kepada balita. Adapun peserta PKH yang dikenakan persyaratan kesehatan adalah RTSM yang memiliki ibu hamil, anak balita atau anak usia lima sampai tujuh tahun yang belum masuk pendidikan SD. Peserta PKH diwajibkan memenuhi persyaratannya yang berkaitan dengan pendidikan jika memiliki anak berusia tujuh sampai lima belas tahun. Anak peserta PKH tersebut harus didaftarkan pada satuan pendidikan setara SD dan SMP dan mengikuti kehadiran di kelas minimal 185 persen dari hari sekolah dalam sebulan selama tahun ajaran berlangsung.

c. Pendataan Penerima Program Keluarga Harapan

Dalam menjalankan Program Keluarga Harapan (PKH) ini, Pendamping PKH yang secara garis besar bertugas sebagai pelaksana program, mendapat data olahan dari pemerintah pusat untuk ditindaklanjuti dan diverifikasi data komponen dan syarat warga sebagai penerima PKH. Syarat dan ketentuan penerima PKH harus mempunyai minimal 1 dari ketiga komponen yang ada di PKH. Komponen PKH adalah Pendidikan (SD, SMP dan SMA/ Sederajat), Kesehatan (Ibu

Hamil dan Balita 0-6 Tahun), Kessos (Keluarga yang mempunyai Lansia 70 tahun dan Disabilitas berat). Untuk mencoret (menghilangkan) data penerima PKH yang dianggap sudah mampu / sejahtera tidak bias dihilangkan secara sepihak harus melalui beberapa prosedur. Pertama dengan cara pendekatan persuasive agar mau mundur dari peserta PKH. Kedua, melalui Musyawarah Desa dengan cara bedah data penerima bantuan dan kemudian diberikan surat keterangan dari Desa kalau memang penerima bantuan sudah mampu/sejahtera.

2. Pemberdayaan masyarakat

Pengertian pemberdayaan masyarakat Pemberdayaan berasal dari kata "daya" yang mendapat awalan bermenjadi kata "berdaya" artinya memiliki atau mempunyai daya. Daya artinya kekuatan, berdaya memiliki arti kekuatan. Kata "berdaya" apabila diberi awalan pe- dengan mendapat sisipan -m- dan akhiran -an menjadi "pemberdayaan" artinya membuat sesuatu menjadi berdaya atau mempunyai kekuatan. (Rosmedi Dan Riza Risyanti, 2006)

Kata "pemberdayaan" adalah terjemahan dari bahasa Inggris "Empowerment", pemberdayaan berasal dari kata dasar "power" yang berarti kekuatan berbuat, mencapai, melakukan atau memungkinkan. Awalan "em" pemberdayaan dapat berarti kekuatan dalam diri manusia, suatu sumber kreativitas. (Lili Baridi, 2009)

Secara konseptual pemberdayaan (empowerment) berasal dari kata power (kekuasaan atau keberdayaan) (Edi Sugarto, 2005). Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang. Khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam: (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (freedom), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan; (b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan; (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

Menurut beberapa pakar yang terdapat dalam buku Edi Suharto, menggunakan definisi pemberdayaan dilihat dari tujuan, proses, dan cara-cara pemberdayaan. Menurut Jim Ife dalam membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung (Edi Suharto, 2005). Masih dalam buku tersebut, person mengatakan bahwa pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam mengontrol dan mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.

Sedangkan menurut Swift dan Levin dalam membangun masyarakat Memberdayakan Masyarakat, pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial. Berdasarkan definisi pemberdayaan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok rentan dan lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan, sehingga mereka memiliki keberdayaan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik secara fisik, ekonomi, maupun sosial seperti: kepercayaan diri, maupun menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Adapun cara yang di tempuh dalam melakukan pemberdayaan yaitu dengan memberikan motivasi atau dukungan berupa sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan bagi masyarakat untuk meningkatkan kapasitas mereka, meningkatkan kesadaran tentang potensi yang di milikinya, kemudian berupaya untuk mengembangkan potensi yang dimiliki tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif,

Sugiyono (2011:15) Metode penelitian kualitatif adalah "metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, sebagai lawannya eksperimen dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive ". informan penelitian ini adalah pendamping PKH. Pemilihan informan sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah berdasarkan pada subjek yang menguasai permasalahan, memiliki data bersedia memberikan lengkap dan akurat. Dalam menentukan informan menggunakan teknik purposive simple purposive simple adalah sampe dengan pertimbangan tertentu. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan observasi dan dilengkapi dengan instrumen dan pedomannya.

Sesuai dengan jenis penelitian ini, maka teknik analisa data yang di kualitatif yaitu menguraikan analisa data gunakan adalah menginterpretasikan data yang di peroleh di lapangan dari keterangan yang di berikan oleh pemerintah desa, maupun kelompok dan masyarakat yang akan di wawancara, dandata dari hasil wawancara akan di uraikan sedemikian rupa untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Sehingga memberikan keterangan yang sebenarnya terhadap permasalahan yang di teliti (Satori, 2011:41) Maka untuk lebih memperjelas posisi dalam tahapan analisa data secara interaktif di gunakan analisa data yakni Analisa data kualitatif dilakukan secara interaktif melalui proses reduksi data, menyajikan data (display data) dan verifikasi/menarik kesimpulan.

PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian yang di lakukan oleh peneliti. Bahwa untuk rujukan data formal jumlah penerima Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sarae Ruma Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima. berdasarkan data yang peneliti terima melalui pendamping PKH sejumlah 256 KK. Dan untuk kriteria komponen penerima Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yaitu komponen pendidikan, komponen kesehatan dan kesejahteraan sosial yang didalamnya memiliki anak usia sekolah SD/SMP/SMA, ibu hamil anak usia balita

mulai umur 0-6 tahun dan lansia penyandang distabilitas berat.

Horoepoetri dkk (2003.79) menyebutkan beberapa dimensi peran sebagai berikut: 1) Peran sebagai suatu kebijakan, penganut paham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan. 2) Peran sebagai strategi, penganut paham ini mengatakan bahwa peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat (public support) 3) Peran sebagai alat komunikasi. Peran didayagunakan sebagai instrument atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan 4) Peran sebagai alat penyelesaian sengketa, peran didayagunakan sebagai suatu cara utuk mengurangi atau meredam konflik melalui usaha pencapaian consensus dari pendapat-pendapat yang ada. 5) Peran sebagai terapi. Peran dilakukan sebagai upaya masalah-masalah psikologis masyarakat seperti halnya perasaan ketidakberdayaan, tidak percaya diri dan perasaan bahwa diri mereka bukan komponen penting dalam masyarakat.

1. Mekanisme Pendataan program keluarga harapan khususnya di desa Sarae Ruma kecamatan Langgudu kabupaten bima. Masih dikatakan kurang memperhatikan kelayakan sebagai calon penerima manfaat (KPM) tersebut hal itu dapat dilihat dari beberapa narasumber yang tidak ingin disebutkan identitasnya bahwa saat ini dari sekian penerima manfaat tersebut terdapat dari kalangan keluarga ekonomi kelas atas dan kelas menengah sehingga dari sebagian kalangan keluarga kelas bawah bertanda tanya soal alur mekanisme pendataan penerima manfaat program keluarga harapan tersebut.
2. seleksi calon penerima manfaat program keluarga harapan bahwa masyarakat di Desa Sarae Ruma Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima sangat antusias dan mendukung peran PKH tersebut. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa peran PKH di desa Sarae Ruma berjalan dengan baik. Berdasarkan Indicator kesejahteraan masyarakat sebelum dan sesudah pelaksanaan PKH ini. Dulu sebelum adanya bantuan PKH Masyarakat Desa Sarae Ruma banyak sekali yang tidak

mampu menyekolahkan anaknya jangankan untuk menyekolahkan anaknya untuk kebutuhan sehari-hari saja kurang. banyak juga yang melakukan utang piutang seperti koperasi simpan pinjam atau bank-bank berjalan. tetapi setelah hadirnya bantuan PKH ini, Sekarang bisa di lihat perubahan grafiknya alhamdulillah PKH ini sangat terbantu sekali masyarakat sangat bersyukur dan berterimakasih kepada pemerintah yang menyalurkan bantuan ini. Maka dari itu sebagian masyarakat sangat mengharapkan bantuan seperti itu merata dikalangan masyarakat yang benar-benar membutuhkan untuk mengurangi beban ekonomi yang mereka hadapi seperti contoh keluarga penerima manfaat yang layak menerima adalah rumah tangga sangat miskin (RTSM) yang berdasarkan kriteria atau pendataan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh oleh desa setempat yang menjadi data awal sebagai acuan pemerintah pusat dalam melakukan verifikasi sehingga data itu sampai ditangan penerima manfaat yang berhak (LAYAK) yang tentunya tidak terlepas dari petunjuk teknis pendamping petugas PKH kecamatan setempat kepada pemerintah setempat.

3. Penetapan calon penerima manfaat program keluarga harapan PKH di desa Sarae Ruma kecamatan Langgudu kabupaten bima. Bahwa untuk penetapan calon penerima manfaat PKH yaitu : bergantung pada data dari pemerintah pusat yang akan verifikasi dan atau validasi data calon penerima PKH untuk menentukan kelayakan calon penerima PKH. dan tentunya yang layak untuk mendapatkan bantuan ini merupakan masyarakat miskin yang memenuhi kriteria pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial dan harus memenuhi kewajibannya sebagai penerima manfaat. Namun masih banyak masyarakat desa Sarae Ruma yang kurang paham mengenai penetapan calon penerima manfaat PKH ini. Karena kurangnya pemerataan informasi sehingga masyarakat juga banyak yang berasumsi yang lain mengenai bantuan ini. Pemerintah Terkait dan pendamping PKH juga kurang melakukan komunikasi yang intens.

4. Sasaran calon penerima Manfaat Program Keluarga Harapan di Desa Sarae Ruma Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima.

Mengenai ketepatsasaran calon penerima manfaat PKH berdasarkan hasil wawancara dilapangan yaitu masih rancung sekali karena masih banyak masyarakat yang miskin yang seharusnya layak untuk mendapatkan bantuan ini. Namun pemerintah desa maupun pendamping PKH kurang memperhatikan kelayakan tersebut. Dan kurangnya keterbukaan informasi mengenai bantuan PKH ini. Dan masyarakat juga sering ada rasa kecemburuan sosial.

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang Peran Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Sarae Ruma Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima. Dapat disimpulkan sebagai berikut : sejauh ini peneliti menyimpulkan bahwa peran program keluarga harapan di desa Sarae Ruma masih kurang efektif karena masih banyak sebagian masyarakat kelas bawah yang sesuai dengan kriteria penerima PKH tidak mendapatkan bantuan ini. Pihak pemerintah desa kurang memperhatikan kelayakan tersebut sehingga masyarakat kelas bawah berasumsi yang lain. karena masih ada sedikit kekurangan dalam hal pemerataan dan penyebaran informasi atau tidak adanya kordinasi pasti antara pemerintah desa dan pendamping PKH di samping itu masyarakat desa Sarae Ruma sangat mendukung dan antusias karena dengan hadirnya bantuan ini dapat mengurangi beban ekonomi masyarakat pada umumnya.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Deskriptif Kualitatif dengan lokasi di Desa Sarae Ruma Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui Observasi, Wawancara dan Dokumentasi dengan pemilihan sampel informan secara purposive sampling.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Usman. 2008. Metodologi Penelitian Sosial. Jakarta: Bumi Aksara.
Arifuddin, 2009. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: CV Pustaka Setia Ali,

- Arikunto, Suharsuni. 2001. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta
- Andre F. Sikula. 1981. *Personel Administration End Human Resource Managment*. New York: 4 Wily Trans Edition.
- Dunn. William N. 2013. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Edi Sugarto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerja Sosial*, (Bandung: PT Ravika Adimatama 2005), Cet Ke-1, Hlm.57
- Ibrahim, 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta Moleong, J.
- Koentjaraningrat. 1995. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* Jakarta Gramedia
- Lexy. 2006. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Lili Baridi, Muhammad Zein, M. Hudri, *Zakat Dan Wirausaha*, (Jakarta: CED)
- Muhammad. (1987). *Penelitian Pendidikan prosedur dan Strategi*. Bandung: Tarsito.
- Nurhasim. K. (2019) *Kementrian sosial program keluarga harapan*. Kirwil PKH :Mataram.
- Nawawi. H. 1987. *Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajahmada University Press.
- Permensos. 2018. *Program Keluarga Harapan*. Jakarta : [https://www. jogloabang.com/permensos](https://www.jogloabang.com/permensos).
- Rosmedi Dan Riza Risyanti, *Pemberdayaan Masyarakat*, (Sumedang: Alqaprit Jatinegoro, 2006), Hlm. 1
- Rossi. Et. Al 2004. *Analisis Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan*. Jakarta: Palmerah.
- Sarwono, Sarlito W & Meinarno, Eko A. 2015. ... 2014. *Psikologi Sosial*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Salahudin. (2019). *Jumlah penerima 2019*. Kabardesantb.com : Bima. PKH Di Kabupaten Bima
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. Sutrisno. H. 1997. *Statistik Jilid2*. Yogyakarta : BPEE
- Wismaningsih. D. (2010). *Program Keluarga Harapan*. <http://kemosos.com>. Jakarta : Dirjen Bantuan dan Jaminan Sosial Jakarta.
- William N. Dunn. 2003. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada
- Zuldafrial, 2012. *Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta : Media Perkasa